

## **BAB II**

### **KERJASAMA PEMERINTAH INDIA DENGAN COCA-COLA DALAM PROSES PELAKSANAAN PRIVATISASI AIR**

Penulisan pada Bab II merupakan bab pembahasan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terkait hubungan yang terjalin antara pemerintah India dengan Coca-Cola dalam proses pelaksanaan privatisasi air. Selain itu dalam Bab II ini juga membahas tentang dampak yang diterima masyarakat India serta peran mereka dalam memerangi eksistensi Coca-Cola yang semakin merugikan di bidang lingkungan yang juga mempengaruhi keamanan nasional negara.

Bab II ini akan dibagi menjadi empat sub bab. Masing-masing sub bab terdiri dari beberapa poin. Pada bagian pertama menjelaskan tentang sejarah masuknya Coca-Cola ke India. Dilanjutkan pada sub bab kedua yang terdiri dari dua poin yaitu mengenai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah India dalam proses pelaksanaan privatisasi air sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan latar belakang pemerintah India memilih privatisasi air sebagai bagian dari perwujudan kemajuan ekonomi. Bagian ketiga membahas tentang dampak yang ditimbulkan Coca-Cola kepada masyarakat India dan dilengkapi dengan aktivitas mereka untuk menjatuhkan Coca-Cola. Setelah itu pada sub bab terakhir akan ditutup dengan kesimpulan.

#### **2.1 Sejarah Masuknya Coca-Cola ke India**

Perusahaan minuman Coca-Cola masuk pada tahun 1993 setelah India membuka perekonomiannya terhadap investasi asing. Coca-Cola menganggap bahwa India sebagai salah satu pasar yang paling menjanjikan dan akan berkembang pesat di dunia. Perusahaan ini merupakan salah satu investor terbesar di India dan juga memiliki ambisi yang kuat untuk tumbuh (Ciafone, 2012). Coca-Cola telah menanamkan modalnya sebesar US\$ 2 miliar diantara tahun 1993-2011 (Bhargava, 2013). Selanjutnya di tahun 2013, Coca-Cola mengumumkan akan menginvestasikan modalnya sebesar US\$ 5 miliar hingga tahun 2020 (CocaColaIndia, 2016). Perkembangan ini

juga dapat dilihat bahwa Coca-Cola India memiliki sebanyak 24 pabrik pembotolan dan juga 25 pabrik pembotolan yang dikelola oleh perusahaan *franchises* (Faheem, 2009). Pabrik pembotolan tersebut memiliki lokasi yang strategis di sekitar India untuk mendapatkan sumber daya air maksimum sehingga pabrik dapat memenuhi permintaan produk yang tinggi. Hal ini yang menuai kontroversi dalam proses pelaksanaan privatisasi air karena pabrik pembotolan dinilai melakukan eksploitasi air yang berlebihan sehingga menyebabkan jumlah air tanah menurun (Srivastava, 2014). Coca-Cola mengelabui masyarakat dengan menggunakan 20 juta liter air tanah untuk memproduksi 5 juta liter minuman Coca-Cola sedangkan 15 juta liter air lainnya dikonversi menjadi air limbah dan dipompakan kembali ke sungai (Thomas, 2008). Maka penurunan kuantitas air tersebut akhirnya menjadi salah satu kerugian yang diberikan Coca-Cola yang mengakibatkan masyarakat mengalami kelangkaan juga pencemaran air.

*if current trends continue”, in 20 years about 60 percent of all India’s aquifers will be in a critical condition... This will have serious implications for the sustainability of agriculture, long-term food security, livelihoods, and economic growth. It is estimated that over a quarter of the country’s harvest will be at risk (WorldBank, 2012)*

Menurut Bank Dunia, apabila eksploitasi air ini masih terus berlanjut dalam 20 tahun kedepan sekitar 60 persen akuifer (lapisan bawah tanah yang mengandung air dan dapat mengalirkan air) di India berada di kondisi kritis maka akan terjadi indikasi permasalahan yang serius terutama bagi keberlanjutan sumber mata pencaharian pada penduduk setempat dalam proses irigasi pertanian, ketahanan pangan dalam jangka panjang. Aktivitas yang merugikan ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dikarenakan banyak kerugian yang perlu ditangani lebih lanjut.

Pada tahun 1998, Coca-Cola membeli 35 hektar lahan di India bagian Selatan yaitu Plachimada, Kerala melalui persetujuan dewan pemerintah setempat dengan harapan pabrik pembotolan yang akan dibangun dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat. Namun ketika Kerala mulai menyadari bahwa air sumur di daerah sekitar pabrik pembotolan menjadi kering, mereka melakukan aksi protes kepada Coca-Cola. Namun Coca-Cola berpendapat bahwa penurunan tingkat air tanah di daerah sekitar pabrik karena kurangnya curah hujan pada dari tahun-tahun sebelumnya (Thomas, 2008).

Coca-Cola memiliki citra yang cukup baik di mata Internasional karena pada tahun 2006 secara empat tahun berturut-turut, pabrik Coca-Cola di India telah memenangkan penghargaan atas *Golden Peacock Environment Management Award for Environmental Practices from the Institute of Directors* dan yang memberikan penghargaan tersebut adalah *World Environment Foundation* (Killer-Coke, 2010). Atas penghargaan yang didapatkan oleh Coca-Cola tersebut, pemerintah India sempat melupakan kerugian-kerugian yang menimpa penduduk Kerala. Kejahatan yang dilakukan Coca-Cola di India juga sangat jelas karena tidak adanya transparansi mengenai tanggung jawab sosial atas pabrik pembotolan yang mereka dirikan.

Pemerintah India tidak mampu mengontrol atas kerugian yang terjadi akibat tindakan Coca-Cola. Adapun bukti bahwa pemerintah India tidak dapat mengontrol kerugian tersebut diantaranya :

1. Kenaikan harga tidak terjangkau oleh masyarakat India

Privatisasi air menyebabkan kenaikan harga karena terdapat banyak biaya yang dikeluarkan dalam peningkatan sistem pemanfaatan air, penyaringan air dan sistem distribusi. Kegiatan tersebut membutuhkan biaya tinggi maka Coca-Cola melakukan pinjaman uang pribadi yang dikenakan bunga tinggi dari pemodal

dan pajak negara. Coca-Cola mendapatkan kembali biaya pengeluaran tersebut dengan cara menagih konsumen, dengan demikian konsumen menanggung beban pembayaran atas pinjaman perusahaan. Kenaikan tarif atas privatisasi membuat air tidak terjangkau oleh masyarakat miskin, kenaikan harga air ini merupakan konsekuensi secara tidak langsung dari IMF dan Bank Dunia kepada pemerintah. Secara terpaksa pemerintah India mengikuti program penyesuaian structural dan tidak dapat memberikan keringanan biaya atas meningkatnya harga air (Sampath, 2002).

## 2. Penambangan air yang tidak berkelanjutan

Privatisasi air merupakan sebuah ancaman penambangan air yang tidak berkelanjutan oleh Coca-Cola dalam memaksimalkan keuntungan. Setelah air menjadi komoditas yang dapat diperjual belikan dan perusahaan diberikan hak tunggal atas air maka penambangan dalam jumlah tinggi dianggap layak. Perusahaan menambang dengan jumlah air yang tidak ramah lingkungan dan menguras air pada kecepatan yang lebih cepat daripada pengisian kembali, maka pemerintah dan populasi yang terkena dampak tidak dapat berbuat banyak untuk secara hukum mencegah perusahaan untuk melakukan aktivitas tersebut.

Saat pemerintah menyerahkan sistem air kepada perusahaan swasta, air akan menjadi sangat sulit untuk membatalkan keputusan tersebut. Kesulitan tersebut dapat dibuktikan bahwa pada pasar global, air sebagai komoditas diperkirakan lebih dari \$ 500 miliar secara global dan \$ 2 miliar di India (Jha, 2002).

### 3. Kualitas Air Terganggu

Akibat penambangan air tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan oleh Coca-Cola sehingga mencemari endapan air tanah dengan jumlah kalsium dan magnesium di Plachimada, Kerala menyebabkan timbulnya masalah kesehatan di daerah tersebut. Perusahaan swasta, A&L Laboratories, yang dikontrak untuk menguji air minum mengetahui adanya kontaminasi tetapi peraturan yang dimaksudkan untuk mendorong privatisasi memastikan bahwa perusahaan tidak diharuskan untuk memperingatkan pemerintah India (Sampath, 2002). Hal ini membuktikan bahwa perusahaan tidak dapat diharapkan untuk memberikan informasi terkait dampak yang terjadi kepada pemerintah India sehingga pemerintah tidak dapat memberikan control terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Coca-Cola.

#### 2.2 Kebijakan Privatisasi Air India

Privatisasi air di India telah diterapkan sejak tahun 1991 seiring dengan dijalankannya kebijakan liberalisasi perekonomian India. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka sektor air yang sebelumnya dikontrol oleh pemerintah beralih dikelola oleh perusahaan swasta. Pemerintah India telah mengadopsi *National Water Policy* (NWP) sejak bulan September, 1987 sebagai dasar kebijakan yang mengatur hak atas air yang mencakup perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya air (NWP, 2002). Namun setelah muncul beberapa kendala dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air maka Kementerian Sumber Daya Air melakukan tinjauan ulang dan memperbarui kebijakannya menjadi *National Water Policy* 2002.

Privatisasi air diatur dalam *National Water Policy* 2002 pasal 13 mengenai partisipasi perusahaan swasta bahwa kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber

daya air. Perusahaan swasta juga diharapkan dapat berperan dalam memberikan bantuan berupa ide-ide inovatif, sebagai wadah yang membantu menghasilkan dana untuk negara dan juga dapat memperkenalkan negara mengenai kinerja perusahaan swasta guna meningkatkan efisiensi layanan dan akuntabilitas. Setelah itu, pemerintah akan mempertimbangkan aktivitas perusahaan swasta secara keseluruhan yang berhubungan dengan privatisasi air seperti dalam upaya membangun, memiliki, mengoperasikan, menyewakan ataupun melakukan proses transfer air melalui fasilitas sumber daya air (NWP, 2002). Meskipun terdapat pemindahan kekuasaan dalam sektor air, namun kepemilikan dan tanggung jawab utama atas air tetap ditangan pemerintah sesuai peraturan yang telah berlaku.

Pada dasarnya air merupakan sumber daya alam utama yang menjadi kebutuhan dasar makhluk hidup dan juga sumber kekayaan nasional suatu negara. Apabila air diprivatisasi maka pemerintah India perlu memonitor setiap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan swasta agar pihak swasta melakukan pengelolaan air secara proporsional. Eksploitasi sumber daya air juga harus diatur sedemikian rupa untuk menghindari konsekuensi lingkungan yang dapat merugikan masyarakat. Hal ini juga telah diatur dalam *National Water Policy* pasal 7 ayat 2 bahwa eksploitasi air yang berlebihan perlu dicegah secara efektif oleh pemerintah pusat dan perlu adanya pengembangan dan implementasi untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan air (NWP, 2002) sehingga meminimalisir terjadinya kelangkaan atau pun pencemaran air.

Hal yang melatarbelakangi keputusan pemerintah India untuk mengadopsi privatisasi air dimula pada tahun 1980 saat India mengalami krisis keuangan karena manajemen perekonomian yang kurang efisien. Ketika biaya pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pendapatan, pemerintah India berupaya meminjam uang dari lembaga keuangan internasional untuk menutup defisit. Lembaga keuangan internasional

tersebut diantaranya *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD), *World Bank*, dan *International Monetary Fund* (IMF). India menerima pinjaman sebesar \$7 miliar, namun mereka mengharapkan India menerapkan kebijakan liberalisasi ekonominya dengan menghapus pembatasannya pada perusahaan swasta (NCRT, 2015). Kemudian India menyetujui persyaratan yang dibuat oleh lembaga keuangan internasional dan mengumumkan kebijakan ekonomi barunya

Pemerintah India memiliki keyakinan terhadap privatisasi bahwa negaranya akan mengalami kemajuan ekonomi dan juga memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan timbal balik. Keuntungan bagi negara yang dapat diraih yaitu masuknya modal asing, masuknya tenaga ahli, meningkatkan efisiensi manajemen, dan meningkatkan kualitas pelayanan (Ates, 2011). Dengan privatisasi juga dapat memperbaiki efisiensi manajemen dengan menghasilkan pendapatan bagi negara dan hal tersebut juga akan mempengaruhi kualitas dari perusahaan.

Kekuatan globalisasi juga berpengaruh besar terhadap masuknya investasi asing di India seperti pasar internasional. Sejak tahun 1980an, serangkaian liberalisasi dibuat untuk ekonomi India, termasuk dalam industri perbankan, sektor listrik juga sektor air (Aiyer, 2008). Sebagai hasil dari reformasi ekonomi, perusahaan internasional besar seperti Coca-Cola, PepsiCo, Suez, Bechtel, dan Vivendi semua masuk ke pasar air India dengan berbagai cara, seperti melalui kontrak pengelolaan air limbah, privatisasi air pada sistem perkotaan, sebagai konsumen dan industri, kemitraan publik, serta manajemen infrastruktur air (Aiyer, 2008).

Sejak pemerintah India menghapus pembatasannya terhadap sektor swasta, sektor air di India kini menjadi milik swasta. Dengan menyerahkan sebagian kekuasaan atas sektor air pada pihak swasta membuat masyarakat mengalami keterbatasan dalam mengakses air karena air menjadi sebuah ekonomi komoditas yang memiliki nilai agar bisa diperjualbelikan. Namun

karena pemerintah India lebih memilih untuk menerapkan privatisasi air maka air menjadi sumber perolehan keuntungan bagi para perusahaan swasta seperti Coca-Cola. Mereka dapat dengan mudah mengontrol air bahkan dalam penelitian kasus ini Coca-Cola tidak segan untuk mengeksploitasi dan mencemari air demi mengeruk keuntungan bagi mereka sendiri.

### **2.3 Dampak Negatif Proses Pelaksanaan Privatisasi Air oleh Coca-Cola : Meningkatnya Kelangkaan Air Tanah Di India**

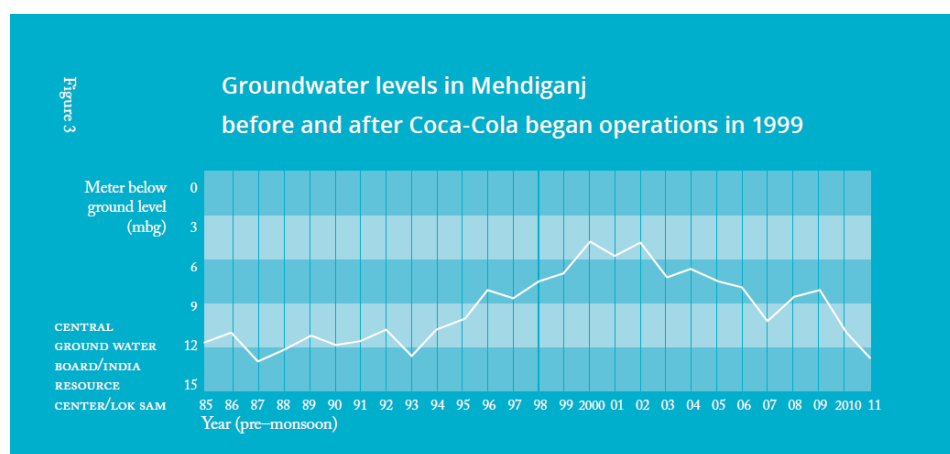
Coca-Cola mengundang banyak perhatian negatif masyarakat India khususnya di wilayah Mehdiganj, Uttar Pradesh; Plachimada, Kerala dan Kala Dera, Rajasthan. Ketiga wilayah tersebut mendapat dampak kerugian privatisasi air yang sangat besar. Kerugian ini disebabkan karena perusahaan swasta yang mengambil alih sektor air cenderung *profit oriented* yang kemudian mengorbankan kepentingan orang banyak. Kerugian ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintah melainkan masyarakatnya sendiri. kemudian aspek-aspek dalam kerugian privatisasi air pun juga berkembang kepada permasalahan hak asasi manusia, permasalahan kesehatan dan permasalahan lingkungan.

Uttar Pradesh termasuk salah satu wilayah termiskin di India. Penduduknya sangat bergantung pada sektor pertanian dan marjinal tingkat tinggi mengacu pada air. Di wilayah ini, kegiatan ekstraksi air tidak memiliki peraturan yang sah sehingga menyebabkan meningkatnya krisis air tanah dan kelangkaan air. Situasi ini berubah secara signifikan dan mengalami tingkat kritis pada berbagai tempat dalam hal kuantitas juga kualitas air yang dikarenakan dengan adanya pabrik pembotolan oleh Coca-Cola (Sinha, 2010). Pabrik pembotolan didirikan pada tahun 1999, kapasitas yang dibutuhkan untuk memproduksi 600 botol berbagai macam jenis minuman Coca-Cola yaitu 500.000 liter air per hari (Drew, 2008). Sebelas tahun setelah berdirinya pabrik pembotolan, air tanah yang mulanya berada



di kategori aman menjadi kritis. Setelah tekanan air memuncak, pihak otoritas negara mulai melakukan penelitiannya pada tahun 2012 dan menetapkan bahwa lokasi pabrik Coca-Cola menggunakan air berlebihan mengakibatkan kuantitas air tanah menjadi sangat rendah.

**Tabel 2.1 : Perbandingan Kadar Air Tanah  
Sebelum dan Sesudah Coca-Cola Beroperasi di**



Sumber : (Hall & Lobina, 2012)

Grafik diatas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pesat dalam kadar pemakaian air tanah setelah Coca-Cola mulai beroperasi di India yaitu tahun 1993. Di tahun sebelum Coca-Cola mulai beroperasi air dibawah permukaan tanah masih berada di sekitar 12mhg. Air tanah di Mehdiganj hampir berada dititik terendah kuantitas air yang menandakan bahwa terjadi kekeringan akibat Coca-Cola. Seiring berjalannya proses produksi pabrik pembotolan, masyarakat mengalami beberapa kesulitan dalam sektor perairan seperti sumur yang kosong. Sumber air yang pada mulanya mudah diakses untuk minum, juga kebutuhan rumah tangga seperti mandi, mencuci, dan memasak malah menghabiskan banyak waktu dengan mengantri air di depan sumur dan pompa. Situasi lingkungan yang tidak mendukung ini pun dirasakan oleh para petani yang perlu mengirigasi sawah dan menyediakan air untuk hewan ternak. Selain itu, beberapa

penduduk Uttar Pradesh yang bekerja untuk Coca-Cola hanya mendapatkan gaji sedikit (sekitar US \$ 1,65 per hari) (Drew, 2008). Setelah itu mereka berupaya untuk melakukan aksi demonstrasi kepada pihak perusahaan.

Sebelum pihak otoritas negara bertindak, penduduk Uttar Pradesh telah berjuang melawan Coca-Cola sejak tahun 2002 demi mendapatkan kembali hak atas air dan juga air sebagai sumber mata pencaharian (TERI, 2008). Mereka melakukan aksi demonstrasi di luar gerbang pabrik Coca-Cola. Para aktivis ini menuntut pemerintah agar surat izin beroperasi segera dibatalkan dan juga menuntut pihak Coca-Cola agar membayar kompensasi atas kerugian yang didapat para petani dan seluruh penduduk Uttar Pradesh (Hills & Welford, 2005). Perlawanan ini merepresentasikan hak terhadap lingkungan hidup para petani miskin yang direbut Coca-Cola atas hasil ekstraksi air dengan slogan seperti "*Coca-Cola Steals Water*".

Pada akhirnya, aksi demonstrasi mendapat perhatian oleh pihak otoritas negara setelah sepuluh tahun berikutnya yaitu tahun 2012. Proses untuk menutup pabrik pembotolan ini perlu dua tahun untuk ditetapkan. Pada bulan Juni 2014, Badan Pengendalian Polusi menemukan bahwa Coca-Cola telah melanggar surat izin untuk beroperasi. Anggota dewan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kapasitas produksi meningkat dua kali lipat dan juga pabrik menyumbang limbah yang mengandung polutan oleh karena itu dewan memutuskan bahwa Coca-Cola harus mengembalikan air tanah yang semakin menipis (Board, 2014). Namun, dengan sangat tidak terduga di bulan yang sama Coca-Cola dapat kembali beroperasi seperti biasa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih berada dibawah kendali Coca-Cola. Berikut beberapa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh penduduk Mehdiganj :

Gambar 2.1 : Aksi Demonstrasi Penduduk Mehdiganj



Sumber : India Resource Center, 2008.

Sama halnya dengan di Uttar Pradesh, Plachimada-Kerala hampir merasakan dampak privatisasi yang sama. Pabrik pembotolan di Plachimada didirikan pada tahun 2000 dan yang terjadi yaitu kekurangan air, sumur kekeringan, dan juga air yang terkontaminasi atas pembuangan limbah beracun. Pertanian juga merupakan sumber pendapatan utama bagi penduduk Plachimada namun karena air terkontaminasi, usaha yang dikeluarkan untuk mencari air jauh lebih besar dibandingkan dengan di Uttar Pradesh. Mereka harus melakukan perjalanan jauh demi mengambil air dikarenakan air disekitar Plachimada telah terkontaminasi, air menjadi tidak layak untuk dikonsumsi bahkan juga tidak dapat digunakan untuk memnuhi kebutuhan rumah tangga lainnya seperti mencuci pakaian, memasak, mandi serta irigasi (Bijoy, 2006).

Pada tahun 2003, BBC melakukan uji coba terhadap limbah yang dihasilkan oleh pabrik pembotolan Coca-Cola, kemudian mereka membuktikan bahwa limbah tersebut mengandung logam beracun seperti kadium dan timah (BBC, 2003). Pembuangan limbah ini mengakibatkan masalah kulit dan gangguan pernafasan pada penduduk setempat (Joseph, 2011). Hakim menekankan bahwa pemerintah tidak seharusnya membiarkan aktor swasta untuk mencemari air karena air sangat penting bagi kehidupan seluruh makhluk hidup dan harus menjadi sumber daya umum yang dapat

dibagi dan dinikmati bersama. Setelah itu, pemerintah mengambil tindakan untuk menghentikan aktivitas pabrik dari pengambilan air untuk tujuan komersil pada tanggal 17 Februari 2004. Petisi tersebut berlangsung pada tahun selanjutnya dimana pabrik pembotolan yang akhirnya ditutup dan penduduk Plachimada berhasil menagakkan hak mereka atas air.

## 2.4 Kesimpulan

Privatisasi air di India telah diatur dalam *National Water Policy 2002* yang dirumuskan oleh Kementrian Sumber Daya Air. Perpindahan fungsi kontrol air dari pemerintah ke swasta menjadi salah satu faktor yang didesakkan oleh para aktor organisasi ekonomi internasional seperti IBRD dan IMF demi mendukung pertumbuhan ekonomi di India. Dalam pelaksanaan privatisasi air, pemerintah India perlu memonitor kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta secara rutin demi supaya privatisasi air berlangsung sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Coca-Cola merupakan salah satu perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang minuman melakukan privatisasi air di India. Sejak Coca-Cola mulai menanamkan modalnya, Coca-Cola juga membantu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu Coca-Cola justru memberikan banyak kerugian atas pabrik pembotolan yang didirikannya. Dalam beberapa wilayah di India mengalami pencemaran serta kelangkaan air. Dapat dibuktikan bahwa Coca-Cola melakukan eksploitasi air tanah akibat pengambilan air tanah yang berlebihan. Eksploitasi air tanah yang berlebihan seperti yang terjadi dalam kasus India dan Coca-Cola membuktikan bahwa proses pelaksanaan privatisasi air telah mengabaikan kepentingan kolektif yaitu hak asasi manusia. Privatisasi air merupakan bentuk ancaman nyata terhadap lingkungan dan juga *human security*. Oleh karena itu, pemerintah India perlu bertindak tegas dan menyediakan aturan baru bagi pabrik pembotolan

Coca-Cola yang sudah berdiri guna meminimalisir kelangkaan dan pencemaran air.

